

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH
YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(STUDI DI PT. SIMS, GROGOT, KALIMANTAN TIMUR)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FAHRUL CHUSAIRI

NIM. 0810113049



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

Firm Responsibility toward Labor Experiencing Work Accident
(Case Study at PT. Sims, Tanah Grogot, East Kalimantan).
FAHRUL CHUSAIRI, Hukum Perdata Bisnis, Law Faculty,
Brawijaya University, May 2013, e-mail: paunk_sfd@yahoo.com

Abstract

In this study, it discussed Firm Responsibility toward Labor Experiencing Work Accident (Case Study at PT. Sims, Tanah Grogot, East Kalimantan).

Implementation of firm responsibility toward labor experiencing work accident would be based on statute law.

In implementing firm responsibility toward labor experiencing work accident there were several obstacles. Objectives of this study were to describe and analyze implementation of firm's law implementation toward labor experiencing work accident, and to found out problems and solution done related to it.

In this writing, law method being used would be sociological approach, that is problem approach by reviewing law in effect and compare it with provision implementation in the field. From data collected, it would be analyze in descriptive qualitative manner which emphasized on systematic data analysis. In implementing firm responsibility toward labor experiencing work accident, some obstacles would be: Reporting with distance obstacles, and frequent mutation of claim division of the company. Efforts conduct to deal with this problem is by maximizing communication, relay unit office, and conducting socialization concerning Jamsostek procedures.

Keywords: firm responsibility, work accident

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Peristiwa Kecelakaan Kerja (Studi kasus PT. Sims, Tanah Grogot, Kalimantan Timur) FAHRUL CHUSAIRI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, email: Paunk_sfd@yahoo.com

Abstrak

Dalam Penulisan Skripsi ini dibahas tentang Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Peristiwa Kecelakaan Dalam Bekerja (Studi kasus PT. Sims, Tanah Grogot, Kalimantan Timur).

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja terdapat kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja, serta mengetahui berbagai kendala dan upaya apa yang dilakukan.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis. Dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengalami kendala, diantaranya : Pelaporan terkendala jarak, Seringnya Mutasi Bagian Klaim dari Pihak Perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: Memaksimalkan Komunikasi, Adanya Kantor Unit Penghubung, Melakukan Sosialisasi Tentang Prosedur Jamsostek.

Kata kunci : tanggung jawab perusahaan, kecelakaan kerja.

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi dewasa ini, pertambangan menjadi komoditas yang sangat penting untuk pemasukan negara. Khususnya, pertambangan batu bara yang menjadi salah satu andalan di sektor migas, yang didalam prosesnya tidak terlepas dari campur tangan perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri. Penyumbang Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang sangat besar di wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) salah satunya yaitu Pertambangan. Dengan banyaknya perusahaan yang bergerak disektor Mineral dan Gas (migas), membuat sebagian besar penduduk berorientasi untuk menjadi pekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Mengenal lebih jauh karakteristik industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Karena itu, dalam rangka menjamin kelancaran operasional, menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja maka diperlukan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan pertambangan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: keselamatan kerja yang diatur adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Keselamatan kerja sendiri merupakan faktor penting yang wajib dimengerti oleh seluruh pekerja dan pengusaha guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi, tenaga kerja merupakan asset yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan kerja (K3) mengingat ancaman bahaya yang berhubungan dengan kerja.

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai peraturan perundangan tersebut sudah mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam berbagai aspek. Mulai dari syarat-syarat keselamatan kerja, larangan kerja buat anak-anak maupun perempuan, alat-alat pelindung yang wajib disediakan pengusaha dan wajib digunakan oleh pekerja / buruh. Kondisi lingkungan yang memenuhi syarat hygienitas dan kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan demi kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hal yang mendasar bagi pekerja dan pengusaha, Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan bahwa : Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 4 ayat (1) program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud pada pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerjanya yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, pasal 4 ayat (2), program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, pasal 4 ayat (3), persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan pada pasal 1, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam, Pasal 2, pengusaha wajib melaporkan kepada Departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Pasal 3, Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja kepada badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya, Pasal 4, tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh menteri. Pasal 17 undang-undang nomor 3 tahun 1992 menjelaskan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.¹ Kecelakaan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, menurut pasal 11 ayat (1), pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal 11 ayat (2), tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

¹ Jaminan Sosial Tenaga kerja, program Jaminan kecelakaan kerja, www.Jamsostek.co.id diakses pada tanggal 16 maret 2012.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 angka (6), yang dimaksud dengan Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Implementasi penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja sendiri sudah diatur didalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1970, pasal 8 ayat (1) menjelaskan : pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya, pasal 8 ayat (2) menjelaskan : pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang telah ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. Penjelasan pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1970 dipertegas pada pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), bahwa pengusaha diwajibkan memberikan pembinaan kepada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Salah satu perusahaan asing yang telah mengeksploitasi hasil mineral dan batu bara di wilayah kabupaten Tanah Grogot ini adalah PT. Sims, yang telah beroperasi selama sepuluh tahun di Kalimantan Timur dan juga banyak mempekerjakan masyarakat sekitar pertambangan untuk menjadi tenaga kerja di pertambangan batu bara di wilayah tersebut. Dengan lokasi tambang yang cukup besar dan luas, untuk menunjang hasil yang maksimal, maka didalam lokasi tambang digunakan alat berat salah satunya *excavator*, dengan banyaknya menggunakan alat berat tersebut, maka keselamatan para pekerja menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan saat bekerja.

Berdasarkan statistik kecelakaan kerja yang diperoleh dari Jamsostek Cabang Balikpapan, periode 2009 hingga kurun waktu 2011 terjadi 4 kasus kecelakaan yang terjadi di PT. Sims Jaya Kaltim.² Kecelakaan kerja disebabkan faktor individual atau secara teknis, yaitu akibat dari *human error* atau kondisi alat yang tidak layak pakai seperti rem pada kendaraan yang blong.³ Untuk asuransi kecelakaan pekerja sendiri diatur didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diikuti terdiri dari: ⁴

1. Jaminan berupa uang yang meliputi :

Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

2. Jaminan berupa pelayanan yang meliputi :

Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menetapkan 4 (empat) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) yang diselenggarakan, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua;
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika pengusaha tidak mengikutsertakan atau tidak membayar iuran yang telah ditetapkan oleh Undang-undang kepada badan penyelenggara sebagai Penanggung, yang

² Hasil wawancara dan prasurey dari narasumber, Bapak Rudi, dikutip pada tanggal 17 Desember 2012.

³ Hasil wawancara dari narasumber, Bapak Ramadhan Satrio, mekhanik senior PT. Trakindo, sebagai data tambahan dalam penulisan skripsi.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 229

diatur didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁵

Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi, bukan berarti kecelakaan ditempat kerja tidak dapat kita cegah. Oleh karenanya maka kita juga perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja itu tidak terulang kembali. Dengan melihat kondisi yang terjadi dilapangan, maka penulis mengangkat tulisan yang belum banyak diteliti oleh kalangan mahasiswa, khususnya dalam penulisan skripsi atau tugas akhir untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pekerja yang mengalami peristiwa kecelakaan dalam bekerja ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan upaya perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami peristiwa dalam bekerja ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti

⁵ Ibid, hal 228

mengenai tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan-peraturan dan teori yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum perusahaan dan mengkaji secara langsung pada perusahaan dan instansi terkait. Di dalam penelitian ini akan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, apa saja yang menjadi kendala perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, serta apa saja upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif Melalui metode deskriptif penelitian ini memberikan gambaran empiris faktual mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap pekerja.

Sementara itu dengan model analisis kualitatif penelitian ini juga menyajikan mengenai kualitas informasi empiris faktual yang juga terkait dengan aspek yang telah dijelaskan. Sehingga dengan demikian melalui penggunaan kedua metode analisis seperti yang dijelaskan penelitian ini secara komprehensif tidak hanya memberikan gambaran data empiris faktual melainkan juga kualitas yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan.

D. Pembahasan

Pelaksanaan tanggung jawab PT. Sims terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

berdasarkan data yang penulis peroleh kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT. SIMS terjadi pada saat korban hendak melakukan perjalanan menuju lokasi tambang. Dengan demikian sesuai dengan pengertian kecelakaan kerja yang terdapat di Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Kewajiban pengusaha yang telah dilakukan oleh PT. Sims dijelaskan pada pasal Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970.

Bahwa keselamatan kerja dan syarat keselamatan pada tempat kerja menjadi hal yang wajib dipatuhi oleh pekerja, dan perusahaan wajib mengingatkan melalui tulisan maupun gambar tentang keselamatan kerja yang mudah dibaca oleh pekerja, untuk mendukung semua syarat keselamatan kerja, perusahaan dan pengusaha melalui manajemen wajib menyiapkan alat-alat pelindung diri untuk pekerja yang hendak bekerja, dalam hal ini pada lokasi pertambangan. Penjelasan pasal 14 ini sudah dilakukan oleh seluruh pekerja dan manajemen PT. Sims dikantor dan dilokasi bekerja.⁶

Pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1992.

Pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 menjelaskan tentang kewajiban pengusaha dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, kewajiban pengusaha dalam pasal ini menjelaskan jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2x24 jam, karena jika pengusaha melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, proses klaim tidak dapat dilakukan. Pengusaha diwajibkan melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa

⁶ Hasil wawancara dan survey pada tanggal 17 Desember 2012.

kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. Pelaksanaan pasal 10 ini juga telah dilaksanakan oleh pihak PT. Sims pada saat terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Arifin dan Bapak Nur Alamsyah, pihak manajemen PT. Sims langsung melaporkan kecelakaan tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja Kota Grogot, dan badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek Kantor Cabang Kota Balikpapan setelah mendapatkan laporan kecelakaan dari korban.⁷

Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1992.

Iuran jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh pengusaha. Kewajiban pengusaha yang dimaksud adalah, dengan mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jika terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib memberikan upah terhitung mulai dari pekerja dalam proses pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Dari ketentuan pasal 20 ayat (1) ini, kewajiban PT. Sims untuk mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga sudah dilakukan, pihak manajemen PT. Sims menyebutkan, seluruh pekerja PT. Sims, terhitung pada saat ia menandatangani kontrak kerja bersama PT. Sims, secara langsung ia didaftarkan ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga dalam kasus kecelakaan kerja ini seluruh iuran ditanggung oleh PT. Sims.⁸ Salah satu contohnya adalah kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Arifin, beliau mengalami kecelakaan saat hendak pulang menuju tempat kerja, dan beliau tidak dapat bekerja selama 30 hari, dari kasus ini pihak manajemen PT. Sims tetap membayar upah atau gaji dari korban.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, dapat dijelaskan bahwa bukan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri staff bagian klaim PT. Sims, dan dengan Bapak Rudi sebagai staff pendataan kecelakaan kerja PT. Jamsostek Kota Balikpapan dikutip pada tanggal 17 Desember 2012.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, staff bagian klaim PT. Sims, dikutip pada tanggal 17 Desember 2012.

hanya pekerja yang wajib mengikuti program jamsostek, pengusaha juga wajib mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengusaha sendiri wajib memiliki daftar data tentang pekerja dan keluarganya, mulai dari upah sampai kecelakaan kerja di perusahaan, pengusaha wajib melaporkan data-data pekerja yang diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara, yaitu PT. Jamsostek, apabila dari perusahaan, tidak mendaftarkan pekerja ke dalam jaminan sosial tenaga kerja, dan kemudian pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam jaminan sosial tenaga kerja itu mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib memberikan hak-haknya kepada tenaga kerja yang bersangkutan itu. Kewajiban pengusaha yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) sampai (5) ini juga telah dilaksanakan oleh PT. Sims dengan mendaftarkan seluruh pekerja kedalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memenuhi hak dari pekerja.⁹

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993

Kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah, pengusaha tetap membayar upah pekerja selama ia tidak mampu bekerja sampai pekerja yang bersangkutan mampu bekerja. Kewajiban PT. Sims terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu bapak Arifin dan Bapak Nur Alamsyah selama mereka tidak dapat bekerja, perusahaan tetap membayar upah selama mereka tidak dapat bekerja karena kecelakaan kerja.¹⁰

Dari penjelasan pasal-pasal yang terkait mengenai kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi, bukan berarti kecelakaan ditempat kerja tidak dapat kita cegah. Oleh karenanya maka kita juga perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya-upaya

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak hendri, staff bagian klaim PT. Sims, dikutip pada tanggal 17 Desember 2012.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko, Kepala safety PT. Sims, dikutip pada tanggal 17 Desember 2012.

untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja itu tidak terulang kembali.

Pencegahan yang dilakukan pihak manajemen PT. Sims adalah dengan memasang gambar-gambar keselamatan kerja, kemudian setiap pekerja yang memasuki lokasi pertambangan diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD) seperti helm, kacamata, baju anti api, sepatu safety dan lain-lain. Penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Sims dalam kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya adalah memberikan pertolongan pertama di lokasi terjadinya kecelakaan kerja, membawa korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam pelaksanaan mengalami berbagai kendala.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Sims dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah :

1. Pelaporan terkendala jarak.

Pasir Mine yang merupakan lokasi pertambangan dari PT. Kideco dan sub-contractornya yaitu PT. Sims dan perusahaan pertambangan lainnya berada cukup jauh dari kantor Jamsostek yang berada di Kota Balikpapan, berdasarkan regulasi yang berlaku, jika terjadi kecelakaan kerja, baik dari pihak perusahaan maupun pihak korban harus membuat laporan tertulis paling lambat 2x24 jam atau 2 hari setelah terjadinya kecelakaan kerja, jika dari pihak perusahaan dan korban tidak membuat laporan tertulis maka korban kecelakaan kerja tidak dapat melakukan klaim JKK.

2. Seringnya Mutasi Bagian Klaim dari Pihak Perusahaan

Jamsostek dan perusahaan sudah sering melakukan penyuluhan kepada pekerja agar meminimalisir kecelakaan kerja, dari pihak Jamsostek juga melakukan penyuluhan kepada pihak perusahaan, agar jika terjadi

kecelakaan terhadap pekerja, segera mengambil tindakan pelaporan kepada Jamsostek, namun dalam hal ini masih dari pihak perusahaan sering melakukan pemindahan atau mutasi bagian klaim, hal ini membuat Jamsostek harus melakukan penyuluhan kembali kepada bagian klaim di perusahaan, agar jika terjadi kecelakaan kerja, korban kecelakaan kerja bisa melakukan klaim dari Jamsostek.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang terdapat diatas adalah :

1. Memaksimalkan Komunikasi

Jamsostek Cabang Balikpapan member kelonggaran jika terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja dari PT. Kideco dan PT. Sims, jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa salah satu pekerja dari perusahaan tersebut, pihak Jamsostek yang diwakili bapak Rudi mengatakan, pihak-pihak yang mengalami kecelakaan kerja, diberi kemudahan untuk proses ganti rugi, jika kecelakaan kerja itu terjadi pada malam hari, dan berdasarkan regulasi yang berlaku baik dari perusahaan maupun dari korban harus melakukan pelaporan secara tertulis 2x24 jam, keringanan yang diberikan Jamsostek Balikpapan adalah, pelaporan kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui via telepon dan email, mengingat jarak yang cukup jauh dari Pasir Mine ke Kota Balikpapan.

2. Adanya Kantor Unit Penghubung.

Kantor Unit Penghubung (KUP) juga salah satu upaya memudahkan pihak-pihak yang mengalami kecelakaan kerja, dengan adanya kantor unit penghubung membuat kemudahan dari pihak perusahaan yaitu baik dari PT. Kideco maupun dari PT. Sims jika terjadi kecelakaan kerja tidak harus membuat laporan tertulis ke Kota Balikpapan. Kantor Unit Penghubung berfungsi untuk memudahkan laporan dari kantor cabang Jamsostek Kota Balikpapan, dengan adanya KUP apabila ada pekerja dari PT. Kideco maupun PT. Sims yang mengalami

kecelakaan, untuk administrasinya bisa dilakukan di KUP yang berada di Kota Grogot, Kalimantan Timur, sedangkan untuk proses penggantiannya tetap harus dilakukan di kantor cabang Jamsostek Kota Balikpapan.

3. Melakukan Sosialisasi Tentang Prosedur Jamsostek.

Hasil wawancara dengan Bapak Rudi yang merupakan salah satu staff Jamsostek Kota Balikpapan, beliau mengatakan, untuk meminimalisir atau menekan tingkat kecelakaan kerja di lokasi pertambangan, pihak Jamsostek setiap 1 tahun sekali sering mengadakan sosialisasi kepada pihak manajemen maupun perwakilan dari pekerja, Untuk pihak manajemen sendiri, sosialisasi yang dilakukan lebih menekankan kepada prosedur biaya ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja atau klaim, sedangkan untuk pihak pekerja Jamsostek melakukan sosialisai tentang pendalaman K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sosialisasi yang dilakukan oleh Jamsotek ini dilakukan setiap 1 tahun sekali dikarenakan bagian atau staff dari pihak perusahaan sering terjadi mutasi, atau pemindahan posisi kerja, oleh sebab itu Jamsostek harus melakukan sosialisai secara intens.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Sims terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan pasal undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab PT. Sims sudah cukup baik dalam kasus kecelakaan kerja, dengan adanya perjanjian kerja, maka pekerja dari PT. Sims mendapatkan perlindungan dari PT. Sims dengan diikuti Jamsostek pada awal perjanjian kerja,
2. Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh PT. Sims.

A. Kendala dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh PT. Sims adalah:

- a. Dalam kecelakaan kerja, lokasi pertambangan dengan rumah sakit menjadi kendala yang cukup menghambat,
- b. proses administrasi klaim ke jamsostek harus dilakukan di kantor cabang yang berada di kota Balikpapan.

B. Upaya yang dilakukan PT. Sims dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah :

- a. semua pekerja PT. Sims pada awal perjanjian kerja, diikutkan Jamsostek, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, pekerja dari PT. Sims mendapatkan biaya pengobatan, melalui program jaminan kecelakaan kerja.
- b. Pihak Jamsostek kantor cabang Balikpapan, memberikan kemudahan, apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan dapat melaporkan kecelakaan kerja melalui telepon atau e-mail.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas , maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. PT. Sims sebagai perusahaan pertambangan harus memberikan penyuluhan lebih sering, untuk menekan angka kecelakaan kerja di lokasi tambang, penyuluhan tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) seharusnya dilakukan per 3 bulan agar pekerja lebih memahami pentingnya Keselamatan Kesehatan Kerja, dalam menekan angka kecelakaan kerja diperlukan kerja sama antara pihak manajemen dengan pekerja.
2. Pihak pekerja harus menaati segala prosedur yang berlaku di lokasi pertambangan untuk menghindari dan menekan tingkat kecelakaan kerja.
3. Pihak manajemen PT. Sims seharusnya membuka kantor untuk urusan administrasi di Kota Balikpapan, hal ini mempermudah dalam

proses klaim ke Jamsostek jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT. Sims.

4. Pihak manajemen PT. Sims dan perusahaan pertambangan lain yang bekerja di pasir mine, membuat Rumah Sakit di area lokasi pertambangan pasir mine, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, mempermudah dalam pertolongan terhadap korban kecelakaan kerja.

G. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 229.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jaminan Sosial Tenaga kerja, program Jaminan kecelakaan kerja, www.Jamsostek.co.id diakses pada tanggal 16 maret 2012.